

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI PONDOK PESANTREN
NAHDLATUL ULUM KABUPATEN MAROS**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Islam (S.E) pada Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Islam UIN Alauddin
Makassar

Oleh :

MUHAMMAD ILHAM B

NIM. 10200111046

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ilham B
NIM : 10200111046
Tempat/Tanggal Lahir : Gorontalo, 4 September 1993
Jurusan : Ekonomi Islam
Alamat : Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami Bontoa Barat
Kota Makassar
Judul : Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren
Nahdlatul Ulum Kabupaten Maros

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar dan hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 10 November 2017

Penyusun,

Muhammad Ilham B
NIM: 10200111046

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul *“Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kabupaten Maros”* yang disusun oleh **Muhammad Ilham B**, NIM **10200111046**, mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal **30 November 2017**, bertepatan dengan **11 Rabi’ul Awwal 1439 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam.

Samata-Gowa, 30 November 2017
11 Rabi’ul Awwal 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Abdul Wahab, SE., M.Si.	(.....)
Penguji I	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.	(.....)
Penguji II	: Sitti Aisyah, S.Ag., M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hj. Rahmawati Muin, M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Abdul Rahman, S.Pd., M.Si.	(.....)



Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji hanya milik Allah Swt, Tuhan yang pantas untuk disembah. Dialah pemilik Arsy yang Agung, memiliki kasih sayang yang tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang tidak merasakannya. Shalawat dan salam juga senantiasa dihaturkan kepada Nabi yang mulia Muhammad Saw. Sosok manusia yang menjadi tauladan sepanjang zaman, padanya terdapat begitu banyak pelajaran dan akhlak mulia. Serta untuk membimbing manusia dari kehidupan jahiliyah menuju kehidupan yang Islami.

Didasari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi yang berjudul “**Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kabupaten Maros**”, tidak terlepas dari bimbingan, arahan yang tulus dan penuh kesabaran dari Ibu Dr. Hj. Rahmawati Muin HS, M.Ag. selaku pembimbing pertama dan Bapak Abdul Rahman, S.Pd.,M.Si. selaku pembimbing kedua. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya semoga Allah SWT memberikan perlindungan, kesehatan dan pahala yang berlipat ganda atas segala kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini.

Secara khusus penulis ingin menyampaikan terimah kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Buniyamin dan Ibunda Nawara Daud yang mendidikku, menyekolahkanku hingga pendidikan tinggi, serta doa dan

dukungan yang tiada henti dalam menyertai langkah dalam menyapaki jenjang pendidikan hingga bisa menyelesaikan pendidikan sarjanadi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Bapak Prof. Dr. Musafir Pabbari, M.Si selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Dr. Hj. Rahmawati Muin HS, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Bapak Drs. Thamrin Logawali, MH selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Seluruh dosen UIN Alauddin Makassar yang telah berkenan memberi kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terima kasih atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan.
7. Kepala Perpustakaan dan segenap staf Perpustakaan UIN Alauddin Makassar yang telah menyiapkan literatur dan memberikan kemudahan untuk dapat memanfaatkan secara maksimal demi penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat terbaik di IKA PPNU, PMII Cabang Gowa, D.O Coffee, ASSET, serta OSEC yang juga mengajarkan banyak hal kepada penulis selama menjadi mahasiswa.

9. Sahabat-sahabat Ekonomi Islam Angkatan 2011 Rio, Syahril Mappatabe, Saud Ramadhan, Mahatir Muhammad, Haris Babel, Rahmatullah, Supriadi Muslimin, Muslihati, dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
10. Adinda-adinda dan kakanda-kakanda Ekonomi Islam, terima kasih atas doa dan nasehat-nasehat yang kalian berikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Olehnya itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik.

Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Samata-Gowa, November 2017

Penulis

MUHAMMAD ILHAM B
NIM: 10200111046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Landasan Teori	14
1. Pengertian Wakaf.....	14
2. Dasar Hukum Wakaf	17
3. Macam-macam Wakaf	21
4. Rukun dan Syarat Wakaf	23
5. Paradigma Wakaf Produktif	30
6. Pengelolaan Wakaf Produktif pada Lembaga Pendidikan Islam	34
7. Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif ...	37
C. Kerangka Pikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Sumber Data	42
D. Metode Pengumpulan Data	44
E. Instrumen Penelitian.....	45
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum	49
B. Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Nahdlatul	

Ulum Maros.....	56
C. Pengembangan dan Pemanfaatan hasil Unit Usaha Pondok	
Pesantren Nahdlatul Ulum Kabupaten Maros	63
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	74
RIWAYAT HIDUP	80



ABSTRAK

Nama : Muhammad Ilham B
NIM : 20600111010
Judul : Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum dan untuk mengetahui pemanfaatan hasil dari pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *syar'i* dan *sosio-history*. Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan mengumpulkan data melalui riset lapangan dengan teknik observasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum dikelola dan dikembangkan berdasarkan konsep “Manajemen Qalbu”. Konsep tersebut bertolak dari keyakinan bahwa manusia rela berkorban dan menunaikan amanah yang diembankan kepadanya dengan baik karena dorongan qalbunya. Dalam mengelola aset wakaf Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum agar menunjang ekonomi pesantren didirikan unit usaha mini market sebagai bentuk pengelolaan wakaf secara produktif, dengan bangunan dua lantai seluas 300 m². Selain itu pesantren juga telah merencanakan unit usaha lain yang dapat menunjang ekonomi pesantren berupa unit usaha *laundry* pesantren.

Pemanfaatan hasil wakaf produktif Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum ditujukan untuk kemajuan pendidikan. Di mana hasilnya di masukkan ke dalam dana kas operasional pesantren untuk mendanai setiap kegiatan-kegiatan baik itu dari segi pendidikan secara madrasah maupun kepesantrenan. Selain itu hasilnya sangat berkontribusi terhadap pendidikan gratis di mana santri yang dianggap kurang mampu tidak dibebankan biaya bulanan sama sekali.

Kata kunci: wakaf produktif, pesantren

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran pondok pesantren memiliki peran sebagai lembaga pendidikan di tengah-tengah masyarakat dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat akan kebutuhan keagamaan. Tuntutan dan kesadaran akan perlunya beragama tersebut dilahirkan dari ajaran Islam untuk menegakkan dan mendakwahkan serta menyiarkan agama Islam kepada seluruh umat muslim antara lain melalui jalur pendidikan. Pesantren berfungsi untuk mempelajari, memahami, mendalami dan menghayati serta mengamalkan ajaran Islam dan aspek perilaku.¹

Pondok pesantren berdiri sebagai jawaban terhadap panggilan keagamaan untuk menegakkan ajaran dan nilai-nilai agama Islam, melalui pendidikan keagamaan dan pengayoman serta dukungan kepada kelompok-kelompok yang bersedia menjalankan perintah agama dan mengatur hubungan antara mereka. Secara perlahan-lahan pesantren berupaya berubah dan mengembangkan cara hidup masyarakat yang mampu menampilkan sebuah pola kehidupan yang menarik diikuti, meskipun hal ini sulit diterapkan karena berat dan banyaknya unsur ideal di dalamnya yang tidak mungkin diterapkan secara praktis dalam masyarakat. Pondok pesantren pada dasarnya memiliki empat syarat utama, yaitu: kyai, santri atau murid, mesjid dan sistem pendidikan. Keberadaan atau eksistensi pondok pesantren beserta

¹B. Setiawan dkk, *Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid XIII*, (Jakarta: PT Delta Pamungkas, 2004), h. 187.

perangkatnya yang ada adalah sebagai lembaga pendidikan serta lembaga kemasyarakatan yang telah memberikan warna pada daerahnya di mana ia berdiri.²

Sejak awal kelahirannya, pesantren tumbuh, berkembang dan tersebar di berbagai pedesaan. Keberadaan pesantren sebagai lembaga yang sangat kental dengan karakteristik Indonesia ini memiliki nilai-nilai strategis dalam pengembangan masyarakat Indonesia.³

Keberadaan pesantren sebagai institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia merupakan salah satu fakta yang tidak terbantahkan. Eksistensinya sebagai institusi tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (*indigenous*).⁴ Pandangan ini merupakan pandangan umum, karena di samping sebagai institusi pendidikan Islam, pesantren juga merupakan lembaga ritual, lembaga pendidikan moral, juga lembaga dakwah.

Dalam sejarah perjalanan eksistensinya, pesantren memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap bangsa ini, khususnya dalam membangun masyarakat desa. Jalaluddin mencatat setidaknya terdapat dua kontribusi, yaitu: melestarikan dan melanjutkan sistem pendidikan rakyat dan mengubah sistem pendidikan aristokratis menjadi sistem pendidikan demokratis.⁵ Disamping itu, kontribusi yang cukup jelas adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dalam tataran porsi yang seimbang, yakni

²Khoiruddin Bukhori, *Problem Psikologis Kaum Santri: Resiko Insekuritas Kelekatan*, (Yogyakarta: FKKB, 2000), h. 77.

³Abd A'la, *Pembaruan Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), h.2.

⁴Nurcholish Majid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 3.

⁵Jalaluddin, *Kapita Selekta Pendidikan*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), h. 9.

baik moral maupun material. Dan juga ikut serta memberikan sumbangsih yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia

Dalam beberapa dekade terakhir, pesantren mengalami perkembangan yang secara kuantitatif luar biasa dan menakjubkan, baik di wilayah pedesaan, pinggiran kota, maupun perkotaan. Pada tabel 1.1 menunjukkan data kementerian Agama bahwa dari tahun 1977 hingga tahun 2016 jumlah pesantren dan santri di seluruh Indonesia mengalami peningkatan.

Tabel 1.1
Data Kementerian Agama dari tahun 1977-2016

No.	Tahun	Jumlah Pesantren	Jumlah Santri
1.	1977	4.195 buah	677.394
2.	1985	6.239 buah	1.084.801
3.	1997	9.388 buah	1.770.768
4.	2001	11.312 buah	2.737.805
5.	2005	14.798 buah	3.464.334
6.	2016	28.961 buah	4.028.660

Sumber: *Millah Jurnal Studi Agama Vol. VI, No. 1.*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pendidikan pesantren mengalami ekspansi, meski berada di bawah sistem dan kelembagaan pendidikan lainnya.⁶

Kendati demikian pesantren tumbuh dan berkembang tidak melalui proses yang instan. Dalam masa-masa kesulitan ekonomi yang dihadapi Indonesia pada dekade 1950-an dan awal 1960-an pembaruan pesantren banyak berkenan dengan pemberian keterampilan, khususnya dalam bidang pertanian, yang tentu saja diharapkan bisa menjadi bekal bagi para santri, selain untuk menunjang ekonomi

⁶Amir Mu'allim, "Isu Terorisme dan Stigmatisasi terhadap Pondok Pesantren (Meluruskan Kesalahpahaman terhadap Pondok Pesantren)", *Millah Jurnal Studi Agama*, Vol. VI, No. 1, (Agustus 2016), h. 47.

pesantren itu sendiri. Penekanan pada bidang keterampilan ini dengan mudah bisa dipahami; dalam masa-masa sulit seperti itu, pesantren semakin dituntut untuk *self supporting* dan *self financing*. Karena itu, banyak pesantren di pedesaan mengarahkan para santrinya untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan *vocational* di bidang pertanian, seperti penanaman padi, kelapa, tembakau, dan kopi yang kebanyakan dikerjakan di atas tanah wakaf. Hasil penjualan dari usaha pertanian seperti itu selanjutnya digunakan untuk membiayai pesantren. Pada waktu yang bersamaan, pesantren-pesantren besar mulai pula mendirikan dan mengembangkan koperasi. Melalui koperasi ini, minat kewirausahaan para santri dibangkitkan untuk kemudian diarahkan menuju pengembangan dan pengelolaan usaha-usaha ekonomi yang sangat diperlukan bila sang santri kembali ke masyarakat.⁷

Institusi pesantren yang mayoritas asetnya dalam bentuk tanah dan bangunan merupakan warisan tradisi masa lalu. Dengan perkembangan zaman, pesantren dituntut untuk mengelola manajemen institusinya yang mayoritas berstatus wakaf agar bergerak dinamis hingga terwujud sebagai institusi wakaf pesantren yang produktif dan institusi dakwah yang tidak terbatas di bidang keagamaan dan pendidikan semata, akan tetapi mampu menjadi institusi yang dapat memberikan kontribusi sosial ekonomi masyarakat melalui program pengembangan masyarakat, peningkatan partisipasi publik, dan advokasi kebijakan yang memihak pada

⁷Nurcholish Majid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, h. 9.

masyarakat lemah.⁸ Keniscayaan ini perlu direalisasikan mengingat mayoritas wakaf sejak awal pertumbuhannya tersedot untuk membiayai fasilitas keagamaan dan pendidikan sebagaimana terdapat dalam institusi pesantren.⁹

Meskipun dalam *Al-Qur'an* tidak terdapat ayat yang menerangkan konsep wakaf secara jelas, namun dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat *Al-Qur'an* yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Salah satunya terdapat dalam QS Al-Baqarah/2: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.¹⁰

⁸Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*, (Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006), h. 23.

⁹Miuhhammad Fuad, *Membangun Raksasa Tidur, Problematika Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf di Indonesia*, (Depok: Pustaka, 2008), h. 76.

¹⁰Kementrian Agama RI, *Quran Tajwid Maghfirah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 45.

Meski tidak satupun terdapat kata wakaf, namun pada dasarnya wakaf adalah menginfakkan sebagian rezeki dari Allah untuk menolong atau berbagi kepada orang lain dalam rangka ibadah.

Secara umum, institusi yang merespon wacana wakaf produktif dapat dikata masih minim. Meskipun demikian, beberapa pesantren yang ada di Indonesia telah menunjukkan respon atas wacana wakaf produktif tersebut dengan berupaya mengelola aset wakafnya ke arah paradigma produktif. Pesantren Darussalam Gontor misalnya,¹¹ telah mengembangkan pengelolaan aset wakaf pesantren dengan menginvestasikan aset wakaf yang dikelolanya dalam bentuk unit-unit usaha berbasis manajemen modern, mengadakan perluasan bentuk wakaf yang tidak hanya terbatas pada benda tetap tapi juga benda bergerak dan tak kalah pentingnya pesantren ini menerapkan pemanfaatan hasil wakaf yang tidak terbatas pada aspek ibadah, namun menembus pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan umat.¹² Tak heran manakala aset wakaf pesantren ini mengalami dinamika yang cukup fantastis, pada tahun 1958 pesantren Gontor memiliki aset tanah sebanyak 18,59 hektar, kemudian pada tahun 2009 aset tanah pesantren ini berkembang menjadi 825,184 hektar, yang kurang lebih 651 hektar diantaranya merupakan tanah wakaf. Aset tanah tersebut diperoleh melalui

¹¹Irfan Abubakar, "Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Gontor: Menjaga Kemandirian Civil Society" dalam Chaider S Bamuallim dan Irfan Abu Bakar, *Revitalisasi Filantropi Islam*, (Jakarta: PBB UIN Jakarta, 2005), h. 226-233.

¹²Yusuf Suyono dkk, *Wakaf Produktif di Indonesia: Studi atas Pengelolaan Aset Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2007), h. 2-3.

wakaf, hibah, tukar menukar, dan pembelian. Di samping itu, pesantren ini telah emnginvestasikan aset wakafnya dalam 27 unit usaha produktif.¹³

Selain Pondok Modern Darussalam Gontor, Pesantren Tebuireng juga mulai nampak bergerak ke arah pendayagunaan aset wakaf secara produktif meskipun proses institusionalisasi wakaf pesantren ini tergolong terlambat. Hal ini diindikasikan dari adanya pengelolaan aset-aset produktif seperti sawah dan kebun yang hasilnya didistribusikan pada kemakmuran pesantren khususnya pembiayaan pendidikan di dalamnya. Meski manajemen wakaf di pesantren ini belum sampai pada taraf profesional namun pesantren ini memiliki kekuatan dalam strategi penggalangan dana (*fundraising*) dan pengembangan wakaf sebagaimana terlihat dari kemajuan dalam penyediaan fasilitas pendidikan di dalamnya.¹⁴

Pesantren lain yang dapat dijadikan contoh pengelolaan aset wakaf produktif adalah pesantren Asshiddiqiyah. Pesantren ini mampu menaikkan aset wakaf dari tanah wakaf seluas 2.600 m² dengan sebuah mushollah menjadi pesantren besar dengan aset tanah sekitar 15 hektar.¹⁵ Di samping itu pesantren ini mengembangkan berbagai usaha bisnis yang hasilnya diorientasikan pada pembiayaan operasional dan

¹³Abdullah Syukri Zarkasy, *Manajemen Pesantren: Pengalaman Pondok Modern Gontor*, (Ponorogo: Trimurti Press, 2005), h. 186.

¹⁴Irfan Abubakar, "Pelebagaan Wakaf di Pesantren Tebuireng Jombang: Sebuah Upaya Merespon Kebutuhan Perubahan" dalam Chaider S Bamualim dan Irfan Abubakar, *Revitalisasi Filantropi Islam*, (Jakarta: PBB UIN Jakarta, 2005), h. 283-295.

¹⁵Muhammad Fuad, *Membangun Raksasa Tidur, Problematika Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf di Indonesia*, (Depok: PIRAMEDIA, 2008), h. 95.

penambahan fasilitas pesantren serta membantu ekonomi masyarakat sekitar khususnya orang tua santri.¹⁶

Tiga pesantren di atas adalah beberapa contoh pesantren yang terlihat responsif dengan urgensi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf secara produktif. Meski tidak terlalu ideal dikatakan sebagai institusi wakaf yang profesional, namun setidaknya beberapa pesantren tersebut telah memberikan inspirasi bagi pesantren lain untuk menjadikan institusi wakaf pesantren sebagai institusi wakaf yang produktif dan tidak hanya berorientasi pada aspek *pure* keagamaan semata namun dapat memberikan nilai *plus* dalam peningkatan kesejahteraan umat.

Di Sulawesi Selatan juga terdapat banyak pesantren yang berdiri di atas tanah wakaf, salah satunya adalah Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum. Dengan bantuan modal awal (hibah) dari Bapak H. M. Jusuf Kalla merekomendasikan kepada AG. H. M. Sanusi Baco, Lc dan atas bantuan Bapak H. Zaenal Basri Palaguna (Gubernur Sulawesi Selatan saat itu), sejumlah Ulama dan Cendekiawan Muslim di Sulawesi Selatan mendirikan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum yang di selenggarakan Yayasan Al-Asy'ariyah Makassar dengan memilih lokasi pondok pesantren berada di Kabupaten Maros, 33 km dari utara Kota Makassar.

Pesantren Nahdlatul Ulum dikembangkan melalui konsep “Manajemen Qalbu”. Konsep tersebut bertolak dari keyakinan bahwa manusia rela berkorban dan menunaikan amanah yang diembankan kepadanya dengan baik karena dorongan

¹⁶Muhammad Fuad, *Membangun Raksasa Tidur, Problematika Pengelolaan dan Pendaayagunaan Wakaf di Indonesia*, h. 75.

qalbunya. Maka atas kesadaran tersebut, bukan hanya bantuan berupa tanah wakaf, bangunan-bangunan yang berdiri di atasnya juga termasuk wakaf dari tokoh-tokoh dan cendekiawan muslim di Sulawesi Selatan.

Melalui bantuan tersebut, Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum menunaikan amanah yang diembannya dengan mengelola dan mengembangkan aset wakafnya secara produktif dengan membangun unit usaha berupa minimarket. Bangunan mini market yang diberi nama Aminah Mart ini juga merupakan wakaf yang dikelola secara produktif sebagai bentuk kemandirian ekonomi yang dapat berguna bagi pesantren dan masyarakat sekitarnya.

Beranjak dari fenomena tersebut maka penulis merasa tertarik meneliti lebih lanjut mengenai pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum dengan mengangkat judul **“Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kabupaten Maros”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas. Maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut.

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum?
2. Bagaimana pemanfaatan hasil dari pengelolaan wakaf produktif Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif berupa Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan hasil dari pengelolaan wakaf produktif Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum.

Selain memiliki tujuan yang jelas, penelitian ini juga tidak terlepas dari manfaat dan kegunaan yang akan diperoleh. Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai wakaf dalam ajaran Islam pada umumnya dan pengetahuan tentang pengelolaan wakaf produktif di pesantren.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah bahan referensi bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian serupa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penulis berharap bahwa dari hasil penelitian yang akan dilakukan dapat memberi manfaat dan sumbangan yang nantinya akan berguna bagi semua pihak yang berkaitan dengan masalah tersebut.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi semua pihak yang terkait dengan masalah-masalah mengenai wakaf produktif.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini penulis menghadirkan beberapa referensi sebelumnya yang telah membahas wakaf produktif. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya pengulangan serta membuktikan keorisinilan penelitian, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Dalam berbagai penelitian mengenai wakaf produktif tentunya cukup banyak dan beragam yang juga mengkaji tentang wakaf produktif namun substansinya berbeda dengan persoalan yang akan diteliti. Olehnya itu penulis tidak menghadirkan seluruh penelitian terdahulu akan tetapi hanya menghadirkan penelitian yang relevan saja dengan tema penelitian.

Penelitian terdahulu yang membahas seputar wakaf produktif diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian dengan judul “Model Pengembangan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo”. Karya Anita Fitriana (2015) dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model penghimpunan sumber wakaf produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo dilaksanakan secara profesional-produktif, profesionalisme yaitu melalui pemberian dari masyarakat umum, aspek manajemen, SDM kenadhiran, pola kemitraan. Model memproduktifkan

sumber atau aset yang ada dengan mengelola beberapa unit usaha: Usaha pertanian, kantin, dan swalayan. Di mana semua usaha dikelola dengan baik dan sangat produktif. Model pemanfaatan hasil wakaf produktif berupa pendistribusian sarana ibadah, sarana bidang pendidikan, peningkatan mutu SDM, menambahkan inventaris berupa pembelian tanah baru dan menambahkan bisnis yang dianggap lebih menguntungkan maupun pemberdayaan masyarakat. Yang berbeda dengan penelitian diatas, pengeloan wakaf Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum masih di kelola secara tradisional dan masih dalam proses peningkatan profesionalisme yang baik, sehingga penelitian ini berusaha menggambarkan dengan jelas konsep yang di terapkan dalam pengelolaannya.

2. Penelitian dengan judul “Peran Wakaf dalam Pengembangan Pendidikan Tinggi Islam, Studi Kasus Universitas Muslim Indonesia (UMI)”. Karya Arif Zamhari (2013). Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar dalam menngembangkan lembaga pendidikan dan usaha-usaha produktif yang berasal dari wakaf umat Islam, dan mengetahui strategi yang dilakukan yayasan ini dalam mengembangkan usaha wakaf produktif. Tulisan ini juga dimaksudkan untuk melihat bagaimana institusi wakaf dapat berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Sementara itu, penelitian kali ini hanya fokus pada pengelolaan wakaf produktif yaitu usaha-usaha yang dilakukan, dan

strategi pengembangan usaha dalam rangka menjaga eksistensi Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum.

3. Penelitian dengan judul “Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama’ Surakarta”. Karya Muliyani (2012) dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Surakarta. Berdasarkan pencarian fakta di lapangan diperoleh bahwa, wakaf produktif di Yapertinus ini ternyata belum bisa di manfaatkan hasilnya. Selain karena wakaf tersebut berbentuk wakaf jangka panjang dimana baru akan dipetik hasilnya nanti pada tahun 2015, banyak kendala pengelolaan yang dihadapi yayasan tersebut. Perbedaan dengan penelitian ini ialah wilayah kajian peneliti serta konsep pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum sebagai bagian dari pendukung kelancaran aktivitas pendidikan.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Wakaf

Secara etimologi kata “wakaf” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” semakna dengan kata “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*”. Kata *al- Waqf* dalam bahasa Arab mengandung pengertian yaitu:

الوقف بمعنى التحبيس والتسبيل

Artinya:

“Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan”¹⁷

Adapaun secara terminologi, wakaf biasanya diartikan “*menahan barangnya, tetapi hasilnya di berikan kepada orang lain, menahan barang tetapi hasilnya disebarkan*”.¹⁸

Wakaf menurut istilah syara’ berarti penahanan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (*al-manfa’ah*) di jalan Allah. Yang di maksud dengan menahan dzat (asal) benda adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, namun digunakan dalam bentuk usaha, dan pemanfaatannya digunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.¹⁹

Sedangkan dalam buku-buku fikih, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Defenisi wakaf menurut ahli fikih adalah sebagai berikut:

1. Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Defenisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan *waqif* itu sendiri. Dengan

¹⁷Kementrian Agama RI, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Wakaf, 2006), h. 1.

¹⁸Sayyid Syabiq, *Fikih Sunnah Jilid XIV*, (Bandung: PT Alma’arif, 1997), h. 447.

¹⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqhi Lima Mazhab*, (Cet. XXV; Jakarta: Lentera, 2010), h. 635.

artian, *waqif* masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, bahkan diperbolehkan menarik kembali dan menjualnya. Si *waqif* apabila meninggal maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, jadi yang timbul dari wakaf tersebut hanyalah menyumbangkan manfaatnya.

2. Mazhab Maliki berpendapat, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, akan tetapi wakaf tersebut mencegah *waqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *waqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Maka dalam hal ini wakaf tersebut mencegah *waqif* menggunakan harta wakafnya selama masa tertentu sesuai dengan keinginan *waqif* ketika mengucapkan akad (*shigat*). Jadi pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).
3. Syafi'iyah dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, setelah sempurna prosedur perwakafan.²⁰ Maka dalam hal ini wakaf secara otomatis memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh *waqif* untuk diserahkan *nazhir* yang dibolehkan oleh syariah, dimana selanjutnya harta wakaf itu menjadi milik Allah.

²⁰Kementrian Agama RI, *Fikih Wakaf*, h. 2-3.

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU no. 41 tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dalam *Al-Qur'an*, kata wakaf sendiri tidak disebutkan secara eksplisit, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat *Al-Qur'an* dan contoh dari Rasulullah saw serta tradisi para sahabat. Diantaranya terdapat dalam QS Al-Baqarah/2: 267.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya

melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.²¹

Menginfakkan harta yang dicintai termasuk perbuatan amal jariyah (wakaf). Dalam QS Ali Imran/3: 92 menyebutkan.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Terjemahnya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.²²

Sedangkan dalam QS Al-Baqarah/2: 261 mengandung keutamaan berinfaq di jalan Allah.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Terjemahnya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”.²³

Secara umum ketiga surah di atas menyatakan agar menginfakan harta di jalan Allah, beramal saleh, tolong menolong sebagai tanda bukti keimanan seseorang.

²¹Kementrian Agama RI, *Quran Tajwid Maghfirah*, h. 45.

²²Kementrian Agama RI, *Quran Tajwid Maghfirah*, h. 62.

²³Kementrian Agama RI, *Quran Tajwid Maghfirah*, h. 44.

Meski tidak satupun terdapat kata wakaf, namun pada dasarnya wakaf adalah menginfakkan sebagian rezeki dari Allah untuk menolong atau berbagi kepada orang lain dalam rangka ibadah. Sebagaimana sifat harta benda diwakafkan bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai kontinyu (terus-menerus). Oleh sebab itu wakaf merupakan sedekah jariyah.²⁴ Kata *tanfiq* pada ketiga ayat tersebut mengandung makna umum, yaitu mengandung makna menginfakkan harta di jalan kebaikan, sedangkan wakaf ialah menyisihkan atau menafkahkan harta di jalan Allah sehingga dijadikan sebagai dalil wakaf.²⁵

Adapun hadis yang menjadi dasar dari wakaf yaitu:

إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له.
(رواه مسلم)

Artinya:

“Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga (macam), yaitu sedekah jariyah (yang mengalir terus), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya” (HR Muslim).²⁶

Hadis Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar:

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon

²⁴Mukhtar Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, (Cet.I; Makassar: Alauddin Press,2011), h. 56-57.

²⁵Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Cet.I; Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada,2015), h. 19.

²⁶Kementrian Agama RI, *Fikih Wakaf*, h. 12.

petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan sedekah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan maksud tidak menumpuk harta” (HR Muslim).²⁷

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar telah menjadi pegangan kuat oleh pakar-pakar hukum Islam sebagai landasan yang kuat bagi pembentukan wakaf. Disamping itu pula telah memberikan gambaran dalil pembentukan wakaf serta adanya amal jariyah. Sedekah jariyah yang dimaksud dalam hadis Abu Hurairah ialah harta yang diwakafkan yang pahalanya mengalir secara terus-menerus, selama benda wakaf itu ada dan dimanfaatkan.²⁸

Dari berbagai hasil pemikiran para ulama Islam terkait dengan *ijma'* dan *qiyash* perwakafan merupakan kumpulan yurisprudensi hukum Islam yang dikumpulkan dalam kitab *fiqh* (*fiqh ijtihadi*). *Fiqh ijtihadi* tersebut adalah ijtihad para ulama untuk menetapkan hukum wakaf yang secara prinsipil (*ushuli*) tidak ada perbedaan pendapat mengenai wakaf, tetapi secara cabang (*far'i*) ada perbedaan pendapat.²⁹

²⁷Kementrian Agama RI, *Fikih Wakaf*, h. 13.

²⁸Mukhtar Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, h. 53.

²⁹Mukhtar Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, h. 57.

Sedikit sekali memang ayat *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa *Khulafa'ur Rasyidin* sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui *ijtihad* mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil *ijtihad*, dengan menggunakan metode *ijtihad* yang bermacam-macam, seperti *qiyash* dan lain-lain.³⁰

Sedangkan dasar hukum wakaf dalam Undang-undang RI Nomor 41 tahun 2004 terdapat pada :

- a. Pasal 2, bahwa wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.³¹
- b. Pasal 3, berbunyi bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.³²

3. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukkan ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

- a. Wakaf Ahli

Yaitu Wakaf yang diperuntukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si *waqif* atau bukan. Wakaf ini juga disebut Wakaf *Dzurri*. Apabila

³⁰Kementrian Agama RI, *Fikih Wakaf*, h. 14-15.

³¹Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, bab II, pasal 2.

³²Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, bab II, pasal 3.

ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi, wakaf *dzurri* ini baik sekali, karena si *waqif* akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

b. Wakaf Khairi

Yaitu, Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.³³

Sedangkan menurut Undang-undang RI Nomor 41 tahun 2004 dalam pasal 16 ayat 1.

1) harta benda wakaf terdiri dari:

- a) Benda tidak bergerak; dan
- b) Benda bergerak.

Dalam pasal 16 ayat 2 dan 3 disebutkan macam benda bergerak dan benda tidak bergerak yaitu:

2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;

³³Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, (Jakarta: UIP, 1988), h. 89-90.

- b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a) Uang;
- b) Logam mulia;
- c) Surat berharga;
- d) Kendaraan;
- e) Hak atas kekayaan intelektual;
- f) Hak sewa; dan
- g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan
- h) Peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

4. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.³⁵ Berikut ini akan dijelaskan mengenai rukun dan syarat yang ada dalam wakaf.

³⁴Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, bab II, pasal 16.

a. Rukun Wakaf

Menurut para ulama, rukun wakaf atau unsur wakaf ada empat, yaitu:

- 1) *Waqif* (pihak yang mewakafkan hartanya)
- 2) *Mauquf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)
- 3) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)
- 4) *Shigat* atau ikrar (pernyataan atau ikrar *waqif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)³⁶

b. Syarat Wakaf

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan di atas, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Waqif* (orang yang mewakafkan). Dalam hal ini syarat *waqif* adalah merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa), tidak berada di bawah pengampuan. Karena *waqif* adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna *waqif* tersebut.
- 2) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan). Dalam perwakafan, agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

³⁵Kementrian Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Cet.III; Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h. 21.

³⁶Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, (Bandung: Yayasan, 1997), h. 27.

- a) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Maksudnya adalah dalam praktiknya harta tersebut dapat bernilai apabila telah dimiliki oleh seseorang, dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun
 - b) Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan
 - c) Harta wakaf itu merupakan hak milik dari *waqif*
 - d) Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, atau benda yang bergerak seperti mobil, mata uang, dan lain-lain
- 3) *Maukuf 'alaih* (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh Syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang bertujuan mendekatkan manusia pada Tuhan. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka *waqif* perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga, atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum yang jelas tujuannya untuk kebaikan.
- 4) *Shighat* (ikrar wakaf). Pernyataan atau ikrar wakaf itu harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi “aku mewakafkan” atau kalimat yang semakna dengannya. Namun *shighat* wakaf cukup dengan ijab saja dari *waqif* dan tidak perlu qabul dari *maukuf 'alaih*. Ikrar ini penting karena membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan wakaf dan harta wakaf menjadi

milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri.³⁷

Secara garis besar, syarat sahnya shighat ijab, baik lisan maupun tulisan ialah sebagai berikut:

- a) *Shighat* harus *munjazah* (terjadi seketika/selesai). Maksudnya ialah shighat tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah shighat ijab diucapkan atau ditulis.
- b) *Shighat* tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian.
- c) *Shighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah shadaqah yang disyari'atkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan Syari'at, oleh karena itu hukumnya tidak sah.
- d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.³⁸

Semua golongan ulama pada dasarnya sepakat dengan syarat-syarat di atas, kecuali golongan Malikiyah yang justru pendapatnya bertolak belakang dengan syarat-syarat tersebut. Mereka berpendapat bahwa:

³⁷Kementrian Agama RI, *Fikih Wakaf*, h. 19-56.

³⁸Kementrian Agama RI, *Fikih Wakaf*, h. 61.

- a) Tidak disyaratkan dalam perwakafan untuk selamanya, walaupun wakaf itu berupa masjid. Tapi boleh mewakafkan selama setahun atau lebih dalam waktu tertentu, kemudian benda itu kembali menjadi milik si *waqif*.
- b) Tidak harus bebas dari suatu syarat, maka boleh berkata: "Barang itu diwakafkan kepada sesuatu setelah satu bulan atau satu tahun, atau berkata: kalau rumah ini milik saya, maka saya wakafkan".
- c) Tidak harus ditentukan penggunaannya, maka boleh berkata: "Saya wakafkan benda ini kepada Allah SWT, tanpa ditentukan kepada siapa wakaf itu ditujukan".³⁹

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi dalam perwakafan sebagaimana disebutkan di atas, kehadiran *Nazhir* sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *Nazhir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk *Nazhir* wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan. Pengangkatan *Nazhir* wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan *Nazhir* dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari *Nazhir* itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrument penting dalam

³⁹Kementrian Agama RI, *Fikih Wakaf*, h. 63.

perwakafan, *Nazhir* harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya.

Secara umum, syarat-syarat *Nazhir* itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Para ahli fikih menetapkan, syarat-syarat yang luwes (pantas dan tidak kaku), seperti hendaklah orang yang pantas dan layak memikul tugasnya.

Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan *Nazhir* yang mampu melaksanakan tugastugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Apabila *Nazhir* tidak mampu melaksanakan tugasnya, maka *Qadhi* (pemerintah) wajib menggantinya dengan tetap menjelaskan alasan-alasannya.⁴⁰

Fleksibilitas persyaratan *Nazhir* wakaf itu tergantung kebutuhan di lapangan. Kalau selama ini *Nazhir* wakaf perseorangan masih dipakai dan ternyata dalam pelaksanaannya tidak memberikan peran yang baik dalam pengelolaan wakaf, maka persyaratan *Nazhir* harus berupa badan hukum menjadi keniscayaan agar dapat memberdayakan benda-benda wakaf secara optimal.

Dari sinilah masalahnya, sebagai *Nazhir* harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengelola wakaf dengan maksimal dan optimal sesuai dengan harapan para *waqif* secara khusus dan kaum *muslimin* secara umum. Sehingga

⁴⁰Kementrian Agama RI, *Fikih Wakaf*, h. 64.

pengalaman-pengalaman pengelolaan harta wakaf yang tidak produktif seperti yang lalu tidak terulang lagi.

c. Unsur dan Syarat Wakaf Menurut Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004

Menurut Undang-undang RI Nomor 41 tahun 2004 pasal 6, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a) Wakif;
- b) Nazhir;
- c) Harta benda wakaf;
- d) Ikrar wakaf;
- e) Peruntukan harta benda wakaf;
- f) Jangka waktu wakaf.⁴¹

Sedangkan yang bertindak sebagai *waqif* dalam pasal 7 meliputi:

- a) Perseorangan;
- b) Organisasi;
- c) Badan hukum.⁴²

Adapun syarat wakif dijelaskan dalam pasal 8 sebagai berikut:

1. Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:

- a. Dewasa;

⁴¹Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, bab II, pasal 6.

⁴²Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, bab II, pasal 7.

- b. Berakal sehat;
- c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
- d. Pemilik sah harta benda wakaf.

2. Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

3. Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.⁴³

Sedangkan untuk syarat dari harta benda wakaf tercantum dalam pasal 15 yang menyatakan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *waqif* secara sah.⁴⁴

5. Paradigma Wakaf Produktif

Wakaf adalah salah satu *icon* filantropi yang telah dikenal dan dipraktikkan sejak lama dalam sejarah umat manusia. Pada masa pra Islam, wakaf telah dipraktikkan oleh masyarakat khususnya pada hal-hal yang menyangkut tempat peribadatan. Kemudian pada masa Islam, wakaf berkembang tidak hanya terbatas

⁴³Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, bab II, pasal 8.

⁴⁴Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, bab II, pasal 15.

pada tempat peribadatan namun juga menyangkut segala harta benda yang dapat diproduktifkan seperti wakaf atas budak, hutang dengan akad *qardhun hasan* dan sebagainya. Sejarah mencatat bahwa awal wakaf dalam Islam dicontohkan oleh Nabi pada pendirian Masjid Quba' yang dibangun di atas tanah milik anak yatim yang mana nabi membelinya seharga seratus dirham lalu mewakafkannya. Di samping itu, nabi juga mewakafkan tujuh kebun kurma milik *Mukhairiq*.⁴⁵

Hal ini mengokohkan wakaf sebagai salah satu lembaga filantropi Islam yang mempunyai karakter adanya perlindungan dan pelestarian harta benda yang diwakafkan oleh seseorang serta penyaluran hasil atau manfaat dari harta benda tersebut secara terus menerus. Karakter demikian menunjukkan bahwa wakaf menghendaki adanya suatu aktifitas pengelolaan harta secara produktif sehingga hasil atau manfaat yang diberikan oleh harta benda tersebut dapat berlangsung lama, dan oleh karena itu wakaf juga dikenal dengan sebutan *sadaqah jariyah*. Karakter wakaf yang demikian sekaligus menegaskan bahwa esensi wakaf adalah produktif yakni suatu usaha yang mengupayakan benda wakaf dapat mendatangkan hasil atau manfaat. Hal ini tentu berbeda dengan jenis filantropi lainnya seperti hibah, zakat, infaq dan sadaqah yang harus habis dibagi dan segera dimanfaatkan tanpa ada kewajiban *mustahiqqin* (orang yang berhak menerima) untuk melestarikannya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pada dasarnya harta diciptakan untuk diambil manfaatnya yang mana pemanfaatannya dapat dilakukan dengan dua cara,

⁴⁵Achmad Siddiq, *Wakaf Produktif dan Poblematikanya di Dunia Pesantren*, (Mojokerto: STIT Raden Wijaya, 2011), h. 277.

yakni cara menghabiskan harta benda tersebut seperti pada hibah, zakat dan sadaqah, atau dengan cara menggunakan harta secara terus menerus dengan tetap menjaga kelanggengan benda tersebut yakni wakaf.⁴⁶

Paradigma wakaf produktif telah lama dilakukan dan nampak berkembang di berbagai kawasan dunia Islam. Di Turki, sejak masa Daulah Abbasiyyah dan Kekaisaran Turki Usmani, wakaf merupakan unit filantropi yang dapat dimanfaatkan pada sektor pendidikan dan penelitian, sektor seni dan budaya, dan wakaf tunai telah dikenal dan dipraktikkan pada masa itu. Adapun sekarang wakaf di negara tersebut sudah terkelola secara profesional dan bahkan dalam wujud investasi di berbagai ladang bisnis. Di Iran, wakaf sudah merambah pada pembiayaan sektor infrastruktur, wisata, dan layanan kesehatan sejak abad ke-10 masehi, begitu juga di Mesir dengan wakaf al-Azhar-nya, Kuwait dengan peran Kuwait Awqaf Publik Foundation (KAPF) yang telah mengantarkan wakaf di negara tersebut menjadi institusi yang mandiri dan mampu menopang kehidupan sosial ekonomi negara.⁴⁷

Perbincangan wakaf di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan regulasi perwakafan yang mengaturnya. Wacana wakaf produktif mulai bergulir dan mendapatkan perhatian sejak kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Banyak hal baru yang diatur oleh peraturan perundang-undangan ini

⁴⁶Achmad Siddiq, *Wakaf Produktif dan Poblematikanya di Dunia Pesantren*, h. 280.

⁴⁷Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*, h. 49-50.

dibanding regulasi sebelumnya, salah satu yang esensial adalah paradigma pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang ditahbiskan dengan semboyan paradigma produktif.⁴⁸

Paradigma wakaf produktif tersebut muncul sebagai respon atas realitas perwakafan nasional yang cenderung konsumtif sebagai dampak atas obyek wakaf yang didominasi dan terbatas dalam wujud tanah sehingga tak heran jika regulasi wakaf tidak independen ketika itu, namun digantungkan atau dijadikan sisipan pada regulasi pertanahan yakni Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang ketentuan pokok Agraria, kemudian diperjelas dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.⁴⁹

Eksistensi wacana produktif di atas merupakan semangat baru yang hendak menjadikan wakaf sebagai instrumen untuk menyejahterakan masyarakat muslim dengan cara menjadikan pengelolaan wakaf yang semula lebih konsumtif kearah pengelolaan yang produktif, oleh karena itu pendekatan yang digunakan tidak hanya pendekatan ekonomi semata namun juga harus digunakan pendekatan bisnis.⁵⁰ Semangat ini nampak pada upaya regulasi wakaf yang mewajibkan nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dan harus dilakukan secara produktif tanpa melanggar prinsip-prinsip

⁴⁸Achmad Siddiq, *Wakaf Produktif dan Poblematikanya di Dunia Pesantren*, h. 281.

⁴⁹Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 2-7.

⁵⁰Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h. 27.

syari'ah. Pengelolaan dan pengembangan secara produktif tersebut antara lain dengan cara pengumpulan (*fundraising*), investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi dan pembangunan gedung, apartemen, rusun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah. pengelolaan dan pengembangan wakaf semacam ini diharapkan dapat dikelola oleh *nazhir* dengan pendekatan bisnis yakni usaha yang berorientasi pada keuntungan dimana keuntungan tersebut dapat disedekahkan kepada para pihak yang berhak menerimanya.⁵¹

6. Pengelolaan Wakaf Produktif pada Lembaga Pendidikan Islam

Wakaf dalam bidang pendidikan adalah investasi penting untuk melahirkan modal insan yang berkualitas seperti ulama dan pemimpin yang berwibawa. Sejarah telah membuktikan bahwa praktik wakaf dalam bidang ini telah melahirkan lembaga-lembaga pendidikan yang berkelanjutan serta melahirkan ribuan ulama yang terkenal dan tersohor di seluruh dunia. Di antaranya adalah Universitas Cordova di Andalus, al-Azhar di Mesir, Madrasah Nizamiyah di Baghdad, Universitas Islam Indonesia, Pondok Pesantren Darunnajah Indonesia, Madrasah Al-Junied Singapura, al-Jamiah Al-Islamiyah di Madinah dan lain-lainnya. Karenanya Imam Sayuti menempatkan ilmu yang paling teratas dalam daftar sepuluh hal wakaf abadi kebaikan setelah kematian seseorang yaitu ilmu yang disebarkan, doa anak yang dididik, pohon kurma

⁵¹Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, h. 28.

yang ditanam, sedekah jariyah, mushaf (*al-Qur`an*) yang diwariskan, tempat berlindung yang dikembangkan, sumur yang digali, sungai yang dialirkan, tempat berteduh bagi musafir, dan tempat ibadah.⁵²

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa bangunan yang pertama diwakafkan oleh Rasulullah SAW. adalah Masjid Quba' yang didirikan sendiri oleh Beliau sewaktu tiba di kota Madinah. Beliau berpendapat bahwa masjid adalah pusat pembangunan masyarakat dalam semua sudut pengembangan baik rohani, jasmani dan intelektual. Masjid adalah tempat ibadah yang dijadikan sebagai lembaga pendidikan yang kedua dalam dunia Islam setelah rumah al-Arqam bin Abi al-Arqam.⁵³ Lembaga pendidikan ketiga dalam Islam yaitu *Kuttab* yang muncul setelah Pemerintah Bani Umayyah (600 M - & 750 M) lama memerintah.

Kuttab atau kata jamaknya *katatib* merupakan salah satu pusat pendidikan awal untuk anak-anak. Kemudian barulah berbagai jenis lembaga pendidikan diwujudkan seperti madrasah, *bait al-hikmah* dan lain-lain yang diwakafkan oleh para khalifah. Institusi-institusi pendidikan ini telah diberi bantuan oleh pewakaf seperti tanah dan harta untuk membiayai dan menjaganya. Para khalifah juga telah memerintahkan agar membagi-bagikan rezeki kepada mahasiswa dan guru-guru untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Cara ini dipelihara pada zaman

⁵²Sayyid Syabiq, *Fikih Sunnah Jilid XIV*, h. 154.

⁵³Ahmad Zaki B, dkk, Pengurusan Harta Wakaf dan Potensinya Kearah Kemajuan Pendidikan Umat Islam di Malaysia, *Jurnal Pengurusan Jawhar* Vol. 2 No. 2., 2008, (28 Juli 2017), h. 28.

Abbasiyah, Fatimiyah, Ayyubiyah, Mamalik dan Utsmaniyah untuk menjamin kehidupan mahasiswa dan guru-guru, agar tenteram dalam berbakti kepada ilmu.⁵⁴

Khalifah al-Ma'mun (198-218H) merupakan individu pertama mengemukakan gagasan agar mendirikan badan-badan wakaf untuk menghasilkan dana atau pendapatan membiayai lembaga pendidikan. Pada masa itu lembaga wakaf merupakan sumber keuangan untuk membiayai lembaga pendidikan Islam. Baitul Hikmah adalah lembaga pendidikan tinggi yang pertama didanai oleh badan-badan wakaf yang dipelopori oleh Khalifah al-Ma'mun di Baghdad. Pada zaman Khilafah Abasiyah (754-1258 M), Ayyubiah (1171-1249 M), Mamalik (1249-1517 M) dan 'Utsmani (1299-1924 M), wakaf berkembang dengan pesat dan berhasil mengembangkan banyak sekolah, perpustakaan dan universitas yang melahirkan banyak sarjana.⁵⁵

Sudah tak bisa dibantahkan lagi, bahwa bukti-bukti sejarah yang menjelaskan peranan wakaf dalam mendukung pelaksanaan pendidikan dalam Islam terutama pada masa klasik, hal ini dapat dilihat dari perkembangan madrasah atau al-Jamiah didirikan dan dipertahankan dengan dana wakaf baik dari dermawan kaya atau penguasa politik muslim.⁵⁶

⁵⁴Ahmad Zaki B, dkk, *Pengurusan Harta Wakaf dan Potensinya Kearah Kemajuan Pendidikan Umat Islam di Malaysia*, *Jurnal Pengurusan Jawhar* Vol. 2 No. 2., 2008, h. 28.

⁵⁵Ahmad Zaki B, dkk, *Pengurusan Harta Wakaf dan Potensinya Kearah Kemajuan Pendidikan Umat Islam di Malaysia*, *Jurnal Pengurusan Jawhar* Vol. 2 No. 2., 2008, h. 28.

⁵⁶Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Mordenisasi Menuju Melenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) h. 10.

7. Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf *Nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya berdasarkan prinsip syariah. Pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif dan diperlukan penjaminan yakni lembaga pemerintah. Sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dalam pasal 43 dijelaskan bahwa (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *Nazhir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif, (3) pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud memerlukan penjaminan, dalam hal ini digunakan lembaga penjamin syariah.⁵⁷

a. Strategi Pengelolaan

Dalam menjalankan unit usaha wakaf produktif, hendaknya para *Nazhir* pengelola terlebih dahulu merumuskan perencanaan secara menyeluruh dalam semua aspek manajemen. Menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

1) Lakukan analisis eksternal dan internal (SWOT)

Rumuskan kekuatan yang dimiliki unit usaha dalam bersaing (*strength*).

Rumuskan kelemahan-kelemahan organisasi yang dapat menjadi faktor penghambat unit usaha dalam bersaing (*weakness*). Rumuskan peluang-peluang

⁵⁷Mukhtar Lutfi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, (Cet.I; Makassar: Alauddin Press, 2012), h. 173-174.

pasar (ceruk pasar) yang dapat dimanfaatkan oleh unit usaha (*opportunity*).

Rumuskan ancaman-ancaman dari para *stakeholder* (pesaing, dsb) yang dapat menjadi faktor penghambat dalam usaha (*threat*).

2) Rumuskan Visi dan Misi unit usaha

Visi adalah kemampuan untuk melihat realitas yang kita alami saat ini, untuk menciptakan dan menemukan apa yang belum ada, serta menjadikan organisasi dalam kondisi yang diinginkan di masa datang. Sedangkan Misi merupakan tahap aksi yang akan dilaksanakan dari visi yang telah ada, guna mencapai suatu tujuan.

3) Canangkan target jangka pendek dan jangka panjang.

Dalam mencapai visi unit usaha, kita harus menjalankan langkah-langkah yang ada di dalam misi unit usaha, yaitu harus menetapkan target, baik dari sisi profit, pangsa pasar, *human capital*, keadaan keuangan dan sebagainya. Maka untuk meraih target harus disusun strategi usaha.

4) Rumuskan strategi usaha (*business plan*)

Tentukan barang & jasa yang dihasilkan, sebisa mungkin harus memiliki keunikan, baik fisiknya maupun pelayannya yang berbeda dengan apa yang pesaing tawarkan. Dengan merumuskan konsep pemasaran dari barang dan jasa (tentukan segmentasi, target, dan posisi pasar serta tentukan strategi

pemasarannya), rencana organisasi dan SDM serta merumuskan rencana keuangan dan investasi unit usaha.⁵⁸

b. Strategi Pengembangan

Untuk mengelola, memberdayakan dan mengembangkan tanah wakaf yang strategis dimana hampir semua *Waqif* yang menyerahkan tanahnya kepada *Nazhir* tanpa menyertakan dana untuk membiayai operasional usaha produktif, tentu saja menjadi persoalan yang cukup serius. Karena itu, diperlukan strategi riil agar tanah-tanah wakaf yang begitu banyak di hampir seluruh propinsi di Indonesia dapat segera diberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat luas. Strategi riil dalam mengembangkan tanah-tanah wakaf produktif adalah melalui kemitraan.

Lembaga-lembaga *Nazhir* harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan ketrampilan usaha sesuai dengan posisi tanah strategis yang ada. Jaringan kerja sama ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh tanah-tanah wakaf tersebut. Sekali lagi harus ditekankan bahwa sistem kerja sama dengan pihak ketiga tetap harus mengikuti sistem syariah, baik dengan cara *musyarakah* maupun *mudhrabah* sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Pihak-pihak ketiga itu adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan. Lembaga ini bisa berasal dari lembaga lain di luar wakaf, atau

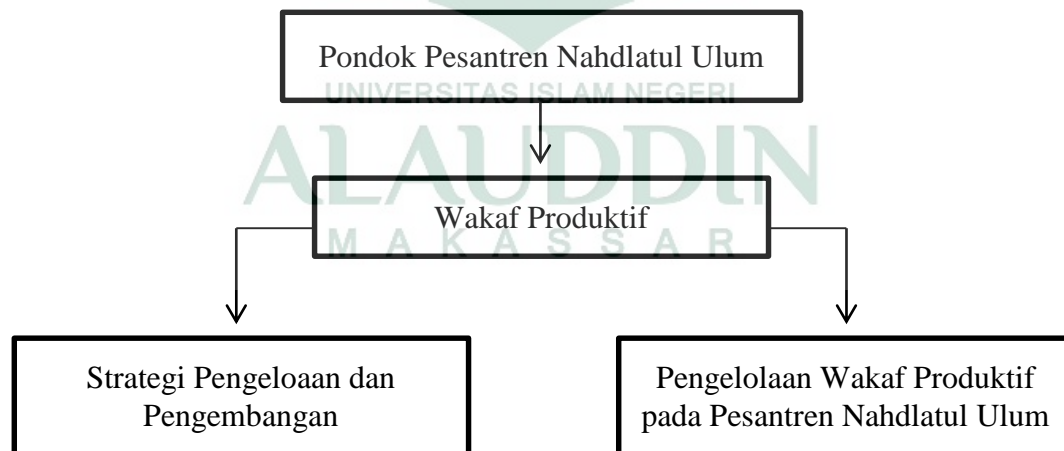
⁵⁸Kementrian Agama RI, “*Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif*”, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2011), h. 16-17.

lembaga wakaf lainnya yang tertarik terhadap pengembangan atas tanah wakaf yang dianggap strategis.

- 2) Investasi perseorangan yang memiliki modal cukup. Modal yang akan ditanamkan berbentuk saham kepemilikan sesuai dengan kadar nilai yang ada. Investasi perseorangan ini bisa dilakukan lebih dari satu pihak dengan komposisi penyahaman sesuai dengan kadar yang ditanamkan.
- 3) Lembaga perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya sebagai pihak yang memiliki dana pinjaman. Dana pinjaman yang akan diberikan kepada pihak *Nazhir* wakaf berbentuk kredit dengan system bagi hasil setelah melalui studi kelayakan oleh pihak bank.⁵⁹

C. Kerangka Pikir

Gambar 2.1
Bagan kerangka pemikiran



⁵⁹Kementrian Agama RI, “Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis””, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), h. 119-121.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berusaha mendeskripsikan pengelolaan wakaf produktif pada Pesantren Nahdlatul Ulum Sorean Maros.

Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati.⁶⁰

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pada penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar laporan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah.⁶¹

⁶⁰Lexy Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 4.

⁶¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet.8; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 9.

2. Lokasi penelitian

Pelaksanaan penelitian ini bertempat di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum yang beralamat di jalan Samudra nomor 37 Soreang Kabupaten Maros Sulawesi Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Data-data yang telah terkumpul dianalisa dengan menggunakan alat analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan *sosio-history*, yaitu agar peneliti dapat mengetahui perilaku organisasi yang sedang diamati termasuk sejarah organisasi dan harta wakaf serta perkembangannya hingga saat ini. Perumpamaan sederhana bagi data penelitian kualitatif adalah bahwa data tersebut berlapis-lapis seperti “umbi bawang”. Peneliti mengupas lapisan umbi satu per satu untuk ditarik sebuah interpretasi yang komprehensif dan solid.⁶²

Selain pendekatan *sosio-history*, penelitian ini menggunakan pendekatan *syar'i* untuk mengetahui apakah implementasi kegiatan wakaf produktif di lapangan telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan bagaimana konsep pengelolaan yang telah dijalankan dalam menempuh keberhasilan mengelola wakaf produktif.

C. Sumber Data

Dengan demikian untuk memperoleh data yang ingin didapatkan oleh penulis, maka dibutuhkan sumber data yaitu sebagai berikut:

⁶²Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Cet.I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), h.54.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung baik dari hasil observasi peneliti, maupun dari responden atau informan kunci dengan teknik wawancara langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Peneliti terjun secara langsung untuk melakukan kunjungan kepada informan terpilih sebagaimana yang ada pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Daftar informan penelitian

No.	Nama	Keterangan
1.	DR. H. Nur Taufiq Sanusi, MA	Wakil Pimpinan Pondok Pesantren
2.	Tabisyir Sanusi, SS	Kabid II Administrasi dan Keuangan
3.	Akbar, S.HI	Kepala Tata Usaha
4.	Munirah	Bendahara Pondok Pesantren
5.	Raya M, S.Pd.I	Manajer Aminah Mart

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran dan penelaahan studi-studi dokumen yang terdapat di tempat penelitian serta dokumen-dokumen lain yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti. Data sekunder yang dikumpulkan antara lain meliputi *Al-Qur'an* dan Hadis yang berkaitan dengan wakaf, Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, buku-buku tentang pengelolaan wakaf, dan lain-lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah metode pengumpulan data melalui proses pengamatan pada sumber data untuk mengetahui aktivitas, perilaku, dan budaya sumber data, sehingga dapat menghasilkan pemahaman kontekstual dan pandangan holistik yang menyeluruh.⁶³

2. Wawancara

Wawancara adalah bertemunya dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam. Melalui wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, yang tidak dapat ditemukan melalui observasi.⁶⁴ Dalam hal ini metode wawancara yang penulis gunakan adalah metode wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang

⁶³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 64-66.

⁶⁴Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, h. 208.

semuanya telah dirumuskan dengan cermat sehingga dalam wawancara menjadi lancar dan tidak kaku.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Dokumen dalam bentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan, kebijakan dan lain-lain. Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh riwayat hidup atau sejarah berdiri sebuah lembaga serta didukung oleh beberapa foto yang telah ada.⁶⁵

E. Instrumen Penelitian

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran dan pengamatan, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian dinamakan instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Penulis sendiri sebagai instrumen dalam penelitian kualitatif. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁶⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 82-83.

1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.
2. Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data yang dianggap penting.
3. Kamera berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan, dengan adanya foto dan rekaman ini maka dapat meningkatkan keabsahan akan lebih terjamin.
4. Tape recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan dengan informan. Penggunaan *tape recorder* dalam wawancara perlu memberi tahu kepada informan apakah dibolehkan atau tidak.⁶⁶

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sebelum peneliti memasuki lokasi penelitian hingga selesai. Analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lokasi, sampai penulisan hasil penelitian.⁶⁷ Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

⁶⁶Esterbg, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 112.

⁶⁷Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, h. 221.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti juga membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola serta membuang yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.⁶⁸

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (*display*) data. Penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (*flow chart*) dan lain sejenisnya. Penyajian data dalam bentuk-bentuk tersebut akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. *Display* data juga terdapat dalam bentuk grafik, matriks, *network* (jejaring kerja), dan *chart*. Untuk mengecek apakah peneliti telah memahami data yang di-*display*, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab.⁶⁹

⁶⁸Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, h. 221.

⁶⁹Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, h. 222.

3. Verifikasi Data

Langkah analisis data kualitatif berikutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan di sini masih bersifat sementara dan akan berubah hingga ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan pengetahuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih abu-abu sehingga yang diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, serta teori.⁷⁰



⁷⁰Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, h. 223.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat

Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum dengan bantuan modal awal (hibah) dari Bapak H. M. Jusuf Kalla dengan merekomendasikan kepada AG. H. M. Sanusi Baco, Lc berupa lahan seluas 3,7 hektar mulai dibangun pada tahun 1998. Kemudian atas bantuan Bapak H. Zaenal Basri Palaguna (Gubernur Sul-Sel saat itu) sejumlah Ulama, tokoh dan Cendekiawan Muslim di Sulawesi Selatan, akhirnya pada tahun 2002 Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Asy'ariyah Nahdliyah (dulu bernama Yayasan Al-Asy'ariyah) Makassar resmi menerima santri baru dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dalam kurun waktu 16 tahun pesantren mampu menambah aset wakaf dari tanah wakaf seluas 3,7 hektar menjadi pesantren dengan aset tanah seluas 4,5 hektar.⁷¹

Lokasi pondok pesantren berada di Kabupaten Maros, 33 km dari utara kota Makassar. Pesantren Nahdlatul Ulum dikembangkan melalui konsep “Manajemen Qalbu”. Konsep tersebut bertolak dari keyakinan bahwa manusia rela berkorban dan menunaikan amanah yang diembankan kepadanya dengan baik karena dorongan qalbunya.

⁷¹Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, “*Profil Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum*”, (Maros, 2017)

2. Visi dan Misi Pesantren⁷²

a. Visi

- 1) Menciptakan pribadi Muslim yang mampu memahami ajaran Islam dengan benar, menguasai IPTEK dan mempraktekannya untuk syiar dan ruhul Islam.
- 2) Menciptakan manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu dan mampu mengamalkan ajaran Islam sejalan dengan perkembangan IPTEK.

b. Misi

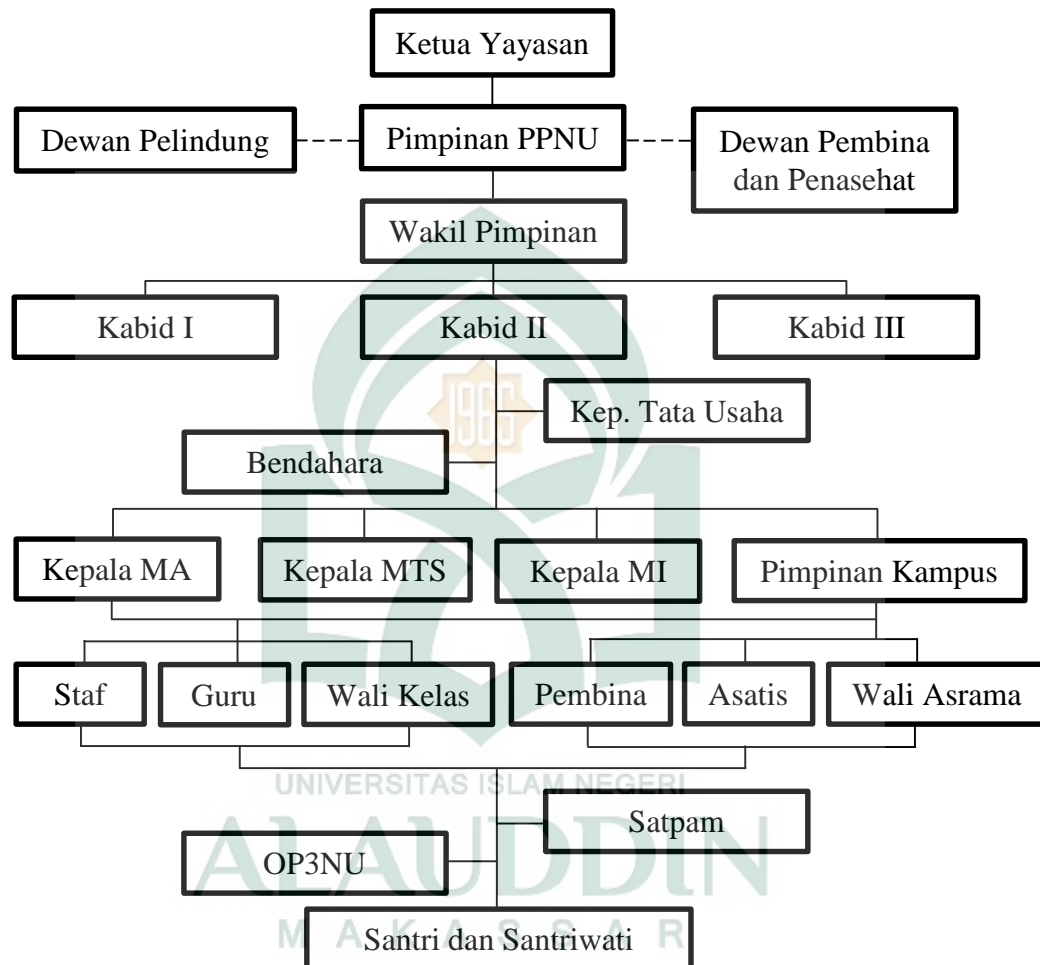
- 1) Mengembangkan keunggulan potensi dzikir dan keunggulan potensi pikir.
- 2) Mengupayakan terciptanya santri yang mampu mempersiapkan dirinya menjadi ulama profesional yang intelektual dan intelektual profesional yang ulama.
- 3) Menyiapkan insan muslim yang mampu mengembangkan keunggulan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat.



⁷²Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, “*Profil Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum*”, (Maros, 2017)

3. Struktur Organisasi⁷³

Bagan 4.1
Struktur Organisasi Pondok Pesantren Nahlatul Ulum (PPNU)



⁷³Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, “*Profil Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum*”, (Maros, 2017)

a. Pelindung

- 1) Drs. H. M. Jusuf Kalla
- 2) Mayjen. TNI (Purn). H. ZB. Palaguna
- 3) DR. H. Syahrul Yasin Limpo, M.Si.
- 4) Brigjen. TNI (Purn). H. M. Amin Syam
- 5) Dr. H. M. Ilham Arif Sirajuddin
- 6) H. A. Najamuddin Aminullah
- 7) Hj. Fatimah Kalla

b. Dewan Pembina

- 1) H. M. Aksa Mahmud
- 2) H. M. Sattar Taba
- 3) Dr. Nur Taufiq Sanusi

c. Pengurus Yayasan

- 1) AG. Dr. H. M. Sanusi Baco (Ketua)
- 2) Drs. H. M. Zein Irwanto, M. Ag. (Ketua I)
- 3) Drs. H. Abd. Rauf Assaggaf (Ketua II)
- 4) Dr. H. Muammar Bakry, MA. (Sekretaris)
- 5) Tabsyir Sanusi, SS. (Bendahara)

d. Dewan Pengawas

- 1) Dr. H. Mokhtar Nur Jaya
- 2) Drs. H. Muhammad Said, M. Pd.
- 3) H. Amir Zainuddin, SE.,MM.

- 4) H. M. Irfan Sanusi
- e. Pimpinan Pondok Pesantren: AG. Dr. H. M. Sanusi Baco
- f. Wakil Pimpinan Pondok Pesantren: DR. Muh. Nur Taufiq Sanusi, MA.
- g. Kabid I Akademik: DR. H. Muammar Bakri, Lc., M.Ag.
- h. Kabid II Administrasi dan Keuangan: Tabsyir Sanusi, SS.
- i. Kabid III Kepesantrenan: Dra. Mukarramah Beta
- j. Pimpinan Kampus: H. M. Irfan Sanusi
- k. Wakil Pimpinan Kampus; H. Abd. Halim, Lc.
- l. Kep. Tata Usaha Pondok Pesantren: Akbar, S.HI
- m. Bendahara Pondok Pesantren : Munirah
- n. Pembina Pondok Pesantren
 - 1) K.H. Tajuddin Arif, S.Ag.,MA.
 - 2) Akbar, S.HI.
 - 3) Kamaruddin, S.Ag.
 - 4) Hanafing, S.HI.,S.Pd.I
 - 5) Muhammad Jafar, S.Pd.I
 - 6) Mugammad Rusli, S.Pd.I
 - 7) H. Ibrahim Kamaruddin, Lc.
 - 8) H. Muhammad Nur, Lc.
 - 9) H. Abdul Halim, Lc.
 - 10) Hj. Samsidar Jamaluddin, Lc.
 - 11) Hj. Muthahharah, Lc.

4. Jenjang Pendidikan

Tabel 4.1
Jenjang Pendidikan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum

No	Jenjang Pendidikan	Akreditasi
1	Madrasah Aliyah (MA)/SMA (Jurusan IPA)	B
2	Madrasah Aliyah Program Diniyah Formal (PDF)	-
3	Madrasah Tsanawiyah (MTS)/SMP	B
4	Madrasah Ibtidaiyah (MI)/SD	-

Sumber: *Profil Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum*.

Jenjang pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) setingkat Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Aliyah (MA) setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), dan juga ada Madrasah Aliyah Program Diniyah Formal (PDF) yang khusus mempelajari ilmu agama dengan mengkaji kitab-kitab klasik, *Al-Qur'an*, dan juga kitab-kitab Hadits.⁷⁴

5. Keadaan Guru dan Santri/Santriwati

a. Jumlah Kiyai

Tabel 4.2
Data Jumlah Kiyai Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum

SMA		S1		S2		S3		Jumlah	
Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
-	-	-	-	1	-	1	-	2	-

Sumber: *Profil Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum*

⁷⁴Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, “*Profil Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum*”, (Maros, 2017)

Kiyai yang ada di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum secara keseluruhan berjumlah 2 orang dengan kualifikasi pendidikan terakhir Master (S2) 1 orang dan Doktor (S3) 1 orang.⁷⁵

b. Jumlah Badal Kiyai

Tabel 4.3
Data Jumlah Badal Kiyai Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum

SMA		S1		S2		S3		Jumlah	
Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
-	-	7	3	1	1	-	-	8	4

Sumber: *Profil Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum*.

Badal Kiyai yang ada di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum secara keseluruhan berjumlah 12 orang dengan kualifikasi pendidikan terakhir Strata Satu (S1) 10 orang dan Master (S2) 2 orang.⁷⁶

c. Jumlah Guru/Ustad

Tabel 4.4
Data Jumlah Guru/Ustad Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum

SMA		S1		S2		S3		Jumlah	
Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1	-	26	25	4	4	1	-	32	29

Sumber: *Profil Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum*.

⁷⁵Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, “*Profil Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum*”, (Maros, 2017)

⁷⁶Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, “*Profil Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum*”, (Maros, 2017)

Jumlah guru secara keseluruhan sebanyak 61 orang dengan kualifikasi guru, tamatan SMA 1 orang, Strata Satu (S.1) 51 orang, Master (S.2) 8 orang, dan Doktor (S.3) 1 Orang.⁷⁷

d. Jumlah Santri

Tabel 4.5
Data Jumlah Santri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum

MI		MTs		MA		PDF		Jumlah	
Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
76	66	266	150	89	89	20	15	451	320

Sumber: *Profil Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum*

Jumlah santri secara keseluruhan pada tahun 2017 sejumlah 771 orang, dengan rincian dari setiap jenjang pendidikan sebagai berikut:

- 1) Madrasah Aliyah : 178 santri
- 2) Madrasah Aliyah Program Diniyah Formal (PDF) : 35 santri
- 3) Madrasah Tsanawiyah : 416 santri
- 4) Madrasah Ibtidaiyah : 142 santri

B. Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kabupaten Maros

1. Bentuk Wakaf

Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum sebagai lembaga pendidikan wakaf mengemban misi dan tanggungjawab pendidikan yang sangat besar. Sebagaimana

⁷⁷Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, “*Profil Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum*”, (Maros, 2017)

hasil wawancara peneliti dengan Wakil Pimpinan Pondok Pesantren bahwa Nahdlatul Ulum tidak semata-mata mencetak santri yang religius tapi juga mampu mengamalkan ilmunya agar sejalan dengan perkembangan teknologi dalam mengarungi masa depan. Hal tersebut sesuai dengan visi pesantren yaitu menciptakan manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu dan mampu mengamalkan ajaran Islam sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁷⁸

Untuk itu Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum mengelola aset wakafnya selain berkontribusi pada bidang pendidikan tetapi juga pada pengelolaan aset wakaf produktif dalam hal ekonomi dengan pendirian unit usaha berupa Mini Market (Aminah Mart) yang dimaksudkan agar pondok pesantren mampu mandiri secara finansial dan berada di garda depan dalam pengembangan mutu pendidikan.

Bila dilihat dari bangunan-bangunan yang berdiri di atas lahan pesantren, hampir seluruh bangunannya juga merupakan wakaf dari berbagai tokoh dan cendekiawan muslim yang ada di Sulawesi Selatan termasuk bangunan mini market pesantren. Pendirian mini market di atas lahan wakaf pesantren diharap mampu membuat aset wakaf pesantren menjadi lebih produktif, sehingga lahan-lahan yang masih kosong tidak terbengkalai. Sebagaimana esensi wakaf adalah produktif yakni

⁷⁸Taufiq Sanusi, Wakil Pimpinan Pondok Pesantren, Wawancara, Makassar (2 Oktober 2017).

suatu usaha yang mengupayakan benda wakaf dapat mendatangkan hasil dan manfaat.⁷⁹

2. Pengelolaan

Berhubungan dengan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf saat ini, masih banyak masyarakat yang memahami bahwa benda yang dapat diwakafkan hanyalah benda-benda tidak bergerak. Sehingga peruntukannya pun sangat terbatas, misalnya untuk pekuburan, masjid, mushallah, rumah yatim piatu, madrasah, sekolah dan sejenisnya. Masyarakat pada umumnya mewakafkan tanahnya untuk didirikan masjid, karena masjid dipergunakan untuk beribadah. Walaupun wakaf untuk masjid juga penting, namun jika jumlahnya sudah banyak, apalagi bila jaraknya saling berdekatan akan mengurangi makna dari peran masjid itu sendiri. Maka akan lebih bermanfaat jika alokasi tanah wakaf dipergunakan untuk memberdayakan ekonomi umat. Jika dilihat dari sejarah wakaf pada masa lampau, baik yang digunakan Rasulullah saw. maupun para sahabat, selain masjid, tempat belajar, cukup banyak wakaf berupa kebun yang produktif, hasilnya pun diperuntukkan bagi mereka yang memerlukan.⁸⁰

Karakter demikian menunjukkan bahwa wakaf menghendaki adanya suatu aktifitas pengelolaan harta secara produktif sehingga hasil atau manfaat yang diberikan oleh harta benda tersebut dapat berlangsung lama. Karakter wakaf yang

⁷⁹Taufiq Sanusi, Wakil Pimpinan Pondok Pesantren, Wawancara, Makassar (2 Oktober 2017).

⁸⁰Mukhtar Lutfi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif (Konsep, Kebijakan dan Implementasi)*, h.176.

demikian sekaligus menegaskan bahwa esensi wakaf adalah produktif yakni suatu usaha yang mengupayakan benda wakaf dapat mendatangkan hasil atau manfaat. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan *Nazhir* yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan bahwa *Nadzir* mencakup tiga macam: Nadzir perseorangan, Nadzir organisasi, dan Nadzir badan hukum.⁸¹ Adanya nadzir dimaksudkan untuk mengelola (memelihara dan menyelenggarakan) harta wakaf sesuai dengan peruntukannya sebagaimana amanat dari wakif. Dalam hal wakaf Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, si wakif yaitu Drs. H. M. Jusuf Kalla mewakafkan tanah untuk keperluan pendirian pesantren. Oleh karena itu, tanah tersebut digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan yang berhubungan dengan pengembangan pendidikan pesantren dan sarana penunjang lainnya yang bersifat produktif.

Dalam hal proses perwakafan di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, ketentuan wakaf sudah memenuhi rukun dan syaratnya, antara lain adalah:

1. Wakif, adalah pihak yang mewakafkan, yaitu Drs. H. M. Jusuf Kalla. Menurut ketentuan pasal 7 UU No. 41 tahun 2004, wakif perseorangan harus memenuhi

⁸¹Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, h. 57.

persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.

2. Mauquf 'alaih dimaknai sebagai tujuan peruntukan wakaf, ada juga yang memaknai sebagai nadzir. Di dalam ikrar wakaf, bahwa wakaf dimaksudkan untuk pendirian, pengelolaan, serta pengembangan pendidikan pesantren dan sarana penunjang lainnya.
3. Mauquf (harta wakaf). Harta yang diserahkan oleh wakif kepada nadzir yaitu berupa tanah seluas 3,7 hektar.
4. Shigat adalah pernyataan wakaf. Serah terima tanah tersebut telah dinyatakan dalam Akta Ikrar Wakaf yang didokumentasikan oleh pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Lau Kabupaten Maros.

Sedangkan mengenai pengelolaan wakaf produktif, dalam hal ini Aminah Mart yang terdiri dari dua lantai berdiri diatas lahan seluas 300 m² yang menyediakan kebutuhan sehari-hari mencakup sandang, pangan, ATK dan lain-lain. Selain untuk memenuhi kebutuhan para santri, juga sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar pesantren. Hal ini sejalan dengan pendirian mini market pondok pesantren yang tidak hanya diperuntukkan kepada para santri saja tetapi diperuntukkan secara umum yakni masyarakat yang ada di sekitar pesantren sehingga dapat memudahkan akses dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁸²

⁸²Raya M (47 tahun), Manajer Aminah Mart, Wawancara, Maros, (3 Oktober 2017).

Unit usaha ini memiliki pengelola tersendiri yang terdiri dari manajer, pramuniaga dan kasir. Adapun nadzir dari tanah wakaf tersebut hanya menjadi pengawas dan pemantau atas unit usaha tersebut tanpa terjun langsung mengelola tanah wakaf tersebut sebagai wakaf produktif.⁸³

Untuk mendorong manajer dan para karyawan dalam merealisasikan tujuan unit usaha pesantren tidak cukup hanya dengan kepercayaan dan ikhlas dalam bekerja, akan tetapi harus mengikat tujuan pribadi para karyawan yang dipekerjakan dengan tujuan-tujuan unit usaha pesantren. Untuk mengikat para karyawan yang dipekerjakan dengan tujuan-tujuan harta wakaf, maka perlu dilakukan beberapa hal penting berikut ini:⁸⁴

1. Membuat standar dalam pemilihan manajer yang layak dan sesuai dengan pengelolaan harta wakaf.
2. Mengikat bisyaroh yang diberikan oleh pengurus dengan peningkatan hasil harta wakaf produktif yang berkelanjutan.
3. Membatasi masa kerja para karyawan, dimana kelanjutan karir tergantung pada kesuksesannya dalam memperoleh keuntungan sebesar mungkin dan melaksanakan dengan rencana merealisasikan tujuan wakaf.

Manajemen yang dijalankan oleh pengurus mini market berdasarkan empat manajemen dasar, yaitu *Planning, Organizing, Action, Controlling*. Dari keempat

⁸³Raya M (47 tahun), Manajer Aminah Mart, Wawancara, Maros, (3 Oktober 2017).

⁸⁴Akbar Syam (31 tahun), Kepala Tata Usaha PPN, Wawancara, Maros, (3 Oktober 2017).

fungsi tersebut ada satu fungsi yang menjadi penunjang dalam pengelolaan wakaf produktif yang menurut penulis belum diperhatikan, yaitu:

1. Perencanaan (*planning*), agar dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Membuat perencanaan adalah sebuah kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Bahkan merupakan sebuah sunnatullah. Membuat perencanaan berarti telah memikirkan tentang masa kegiatan ekonomi yang dilakukan beserta segala kemungkinan yang akan terjadi, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Dengan membuat perencanaan akan dapat menentukan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai keberhasilan dan menghindari yang merugikan. Dalam menyusun perencanaan diperlukan kajian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan kelayakan kegiatan ekonomi tersebut.
2. Pengorganisasian (*Organizing*), bahwa organisasi juga diartikan sebagai suatu keseluruhan termasuk di dalamnya fasilitas, material, dan dengan perilakunya yang diatur menurut posisi berdasarkan tugas pekerjaan. Struktur organisasi merupakan suatu rangka kerjasama dari berbagai bagian menurut pola yang menghendaki adanya tertib, penyusunan yang logis dan hubungan yang serasi. Jadi dalam suatu struktur organisasi terdapat rangka yang menunjukkan segenap tugas pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi, hubungan antara fungsi-fungsi, serta wewenang tanggung jawab tiap anggota organisasi.

3. Pengawasan (*Controlling*), pengawasan terhadap kinerja pengurus menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam rangka menilai keberhasilan unit usaha. Bahwa prestasi pekerjaan harus diberikan penilaian dengan memberikan penafsiran apakah sesuai standar, sejauh mana terdapat penyimpangan dan apa saja faktor-faktor penyebabnya.

C. Pengembangan dan Pemanfaatan hasil Unit Usaha Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Kabupaten Maros

Pada prinsipnya nadzir wajib mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf, yaitu memajukan kesejahteraan umum, dan dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan wakaf produktif dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi yang harus terus dikembangkan oleh orang atau badan yang mempunyai wewenang untuk harta benda wakaf, sangat bergantung kepada nadzir yang profesional, amanah dan memiliki rasa tanggung jawab, sehingga tak heran jika nadzir memegang peranan penting agar harta wakaf tersebut berkembang sebagaimana mestinya.⁸⁵

Direktorat Pemberdayaan Wakaf mengemukakan beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk mengembangkan wakaf secara produktif.

1. Pemetaan potensi ekonomi sebelum pemberdayaan wakaf dilakukan, pemetaan potensi ekonomi harus dibuat terlebih dahulu. Sejauhmana dan seberapa

⁸⁵Mukhtar Lutfi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif (Konsep, Kebijakan dan Implementasi)*, h.197.

mungkin benda wakaf itu dapat diberdayakan dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, letak geografis, seberapa besar dukungan masyarakat, peluang pasarnya, dan dukungan teknologi apa yang tersedia.

2. Melakukan studi kelayakan usaha, berdasarkan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Thread*). Yaitu sebagai antisipasi terhadap upaya pemberdayaan wakaf produktif.
3. Membuat proposal pemberdayaan, yaitu latar belakang, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologis, aspek organisasi, manajemen, ekonomi keuangan serta kesimpulan dan rekomendasi.
4. Menjalin kemitraan usaha dan mencari investor.
5. Menyiapkan SDM yang berkualitas (amanah dan profesional).
6. Mengelola dengan manajemen amanah dan profesional yaitu dikelola dengan manajerial amanah, modern, transparan, dan akuntabel.⁸⁶

1. Pengembangan dan Pemanfaatan

Dalam pengembangan aset wakaf di pesantren, agar dapat dikelola secara produktif dalam hal ini unit usaha mini market Aminah Mart didirikan atas dasar melihat perlunya kemudahan akses masyarakat pesantren dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tentunya ini merupakan potensi yang dilihat oleh pihak pesantren sebagai peluang dalam pengembangan aset wakaf secara produktif.

⁸⁶Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jederal Bimas Islam, Departemen Agama RI, *Wakaf For Beginners*, 2009, h. 84-85.

Sedangkan mengenai pemanfaatan hasil, sejak awal pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum selain sebagai percontohan wakaf produktif juga ditujukan untuk kemajuan pendidikan. Diharapkan nantinya hasil dari wakaf produktif dapat menunjang pendidikan bagi santri yang kurang mampu sehingga bisa meneruskan pendidikannya dengan memberikan beasiswa atau mendirikan sekolah gratis.⁸⁷

Sampai saat ini pemanfaatan hasil dari unit usaha yang telah berjalan dimasukkan ke dalam dana kas operasional pesantren untuk mendanai setiap kegiatan-kegiatan di pesantren baik itu dari segi pendidikan secara madrasah maupun kepesantrenan, baik itu formal maupun non formal. Di samping itu ada beberapa santri yang dianggap kurang mampu tidak dibebankan biaya bulanan sama sekali. Karena dengan adanya penghasilan dari produktifitas aset wakaf yang dikelola dalam hal ini Aminah Mart, sehingga mampu menutupi biaya bulanan tersebut.⁸⁸

2. Kendala dan Langkah Strategis

Dalam perjalanan pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, ditemukan berbagai dinamika terhadap usahanya sebagai pengemban amanah wakaf (Nadzir). Bila dilihat dari awal berdirinya Aminah Mart pada tahun 2009 sampai 2017 muncul berbagai tantangan atau kendala hingga upaya-

⁸⁷Tabsyir Sanusi, Kabid II Administrasi dan Keuangan, Wawancara, Makassar, (2 Oktober 2017)

⁸⁸Akbar Syam (31 tahun), Kepala Tata Usaha PPN, Wawancara, Maros, (3 Oktober 2017).

upaya perbaikan kedepan agar pesantren dapat beroperasi secara berkesinambungan dan tetap menjaga eksistensinya di masa yang akan datang.

a. Aminah Mart

1) Strategi pengembangan⁸⁹

- a) Menjalni kerjasama dan bermitra dengan distributor dalam hal pengadaan barang mini market.
- b) Pengadaan sistem komputerisasi untuk unit usaha.
- c) Pengadaan mesin foto copy dengan bekerjasama dengan perusahaan foto copy.
- d) Pemanfaatan gedung lantai dua dengan menjual pakaian muslim.
- e) Mengadakan pelatihan SDM.

2) Pendapatan usaha

Tabel 4.6

Realisasi Pendapatan Usaha Tahun 2015-2016

Tahun	Pendapatan Usaha
2015	Rp. 56.220.239
2016	Rp. 44.413.559

Sumber: Profil Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum.

⁸⁹Bidang Administrasi dan Keuangan PPN. Laporan Tahunan PPN 2015/2016

Realisasi pendapatan usaha tahun 2015 (periode Juli s/d Desember) sebesar Rp. 56.220.239,- sedangkan pendapatan tahun 2016 (periode Juli s/d Desember) sebesar Rp. 44.413.559.⁹⁰

3) Kendala yang dihadapi

- a) Pengadaan barang yang masih dikelola sendiri tanpa melalui distributor sehingga terkadang mengalami kekurangan dan harus menunggu sampai berminggu-minggu.
- b) Pengadaan logistik dari setiap kegiatan pesantren yang berasal dari mini market terkadang mengalami penundaan pelunasan, sehingga perputaran dana agak melambat.
- c) Lantai dua yang belum difungsikan disebabkan masih banyaknya keperluan lain yang harus diutamakan.
- d) Tidak beroperasi pada saat libur panjang baik pada saat penerimaan santri baru dan juga bulan Ramadhan.

4) Solusi

- a) Perlu penambahan modal dari pihak Pesantren, untuk pengembangan usaha.
- b) Proses pencairan tagihan dan penetapan harga dari bagian perlengkapan pesantren, seharusnya dipercepat.
- c) Semua komponen harus ikut mendukung untuk pengadaan seluruh kebutuhan.

⁹⁰Munirah (26 tahun), Bendahara PPNU, Wawancara, Maros, (4 Oktober 2017).

b. Perencanaan Unit Usaha Baru

Laundry Pesantren

1) Faktor-faktor

- a) Banyaknya laporan orang tua santri mengenai pakaian anak-anaknya yang hilang.
- b) Sebagian besar santri lebih memilih membawa pakaian kotornya untuk dicuci di *laundry* yang berada di luar lingkungan pesantren dari pada mencucinya sendiri.
- c) Banyaknya pakaian yang berserakan di jemuran karena tidak diangkat.

2) Realisasi perencanaan unit usaha

- a) Melakukan sosialisasi kepada para orang tua santri terhadap pengadaan *laundry* pesantren.
- b) Mengadakan mitra dengan perusahaan *laundry* di luar pesantren.

3) Kendala yang di hadapi

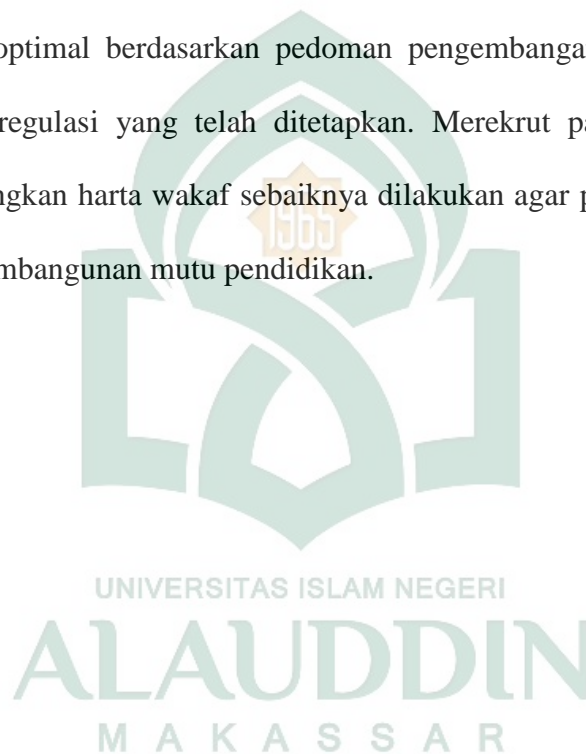
- a) Modal usaha yang kurang.
- b) Ketersediaan air masih kurang sehingga usaha *laundry* sulit direalisasikan.
- c) Perlunya tenaga kerja yang mampu menjalankan dengan profesional.

4) Solusi

- a) Penambahan modal usaha.
- b) Perbaikan dan penambahan fasilitas yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha.

Dilihat dari paparan tersebut dapat diasumsikan bahwa wakaf produktif di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum masih perlu mengupayakan optimalisasi peran pengurus dalam mengelola aset wakaf. Pengelola semata-mata tidak hanya memahami konsep wakaf namun perlu adanya integrasi antara pemahaman fikih dan

aktualisasi peran dalam bidang yang dikelola. Oleh karena itu dengan mengoptimalkan wakaf produktif dapat meningkatkan produksi dan pendapatan wakaf produktif setidaknya dapat mengalami kenaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga peruntukan wakaf dalam bidang pendidikan, sosial dan sebagainya semakin dirasakan oleh masyarakat dimana usaha-usaha yang dikelola pada Pesantren Nahdlatul Ulum sangat berpotensi menghasilkan surplus apabila dikelola dengan optimal berdasarkan pedoman pengembangan harta wakaf secara produktif sesuai regulasi yang telah ditetapkan. Merekrut para profesional andal untuk mengembangkan harta wakaf sebaiknya dilakukan agar pesantren tetap berada di garda depan pembangunan mutu pendidikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan wakaf produktif pada Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum dikelola dan dikembangkan berdasarkan konsep “Manajemen Qalbu”. Konsep tersebut bertolak dari keyakinan bahwa manusia rela berkorban dan menunaikan amanah yang diembankan kepadanya dengan baik karena dorongan qalbunya. Berawal dari wakaf tanah Bapak Drs. H. M. Jusuf Kalla seluas 3,7 hektar dibangun di atasnya pondok pesantren yang juga hampir seluruh bangunannya merupakan wakaf dari tokoh-tokoh Sulawesi Selatan. Agar menunjang ekonomi pesantren didirikan unit usaha mini market sebagai bentuk pengelolaan wakaf secara produktif, dengan bangunan dua lantai seluas 300 m². Selain itu pesantren juga telah merencanakan unit usaha lain yang dapat menunjang ekonomi pesantren dengan unit usaha *laundry* pesantren.
2. Pemanfaatan hasil wakaf produktif Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum ditujukan untuk kemajuan pendidikan. Di mana hasilnya di masukkan ke dalam dana kas operasional pesantren untuk mendanai setiap kegiatan-kegiatan baik itu dari segi pendidikan secara madrasah maupun kepesantrenan. Selain itu hasilnya sangat berkontribusi terhadap pendidikan gratis di mana santri yang dianggap kurang mampu tidak dibebankan biaya bulanan sama sekali.

B. Saran

1. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi dan peruntukannya berdasarkan prinsip syariah, dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif dan mengupayakan penjamin syariah, serta memajukan kesejahteraan umum, dan dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.
2. Peran lembaga-lembaga wakaf tentunya sangat diperlukan saat ini agar bisa meningkatkan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif sehingga wakaf nantinya tidak hanya bersifat konsumtif.
3. Masyarakat disekitar perlu dilibatkan untuk ikut mengawasi dan mengontrol pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, baik terhadap aspek administrasi maupun keuangan, pengawasan dari masyarakat ini dapat lebih efektif, karena bersifat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la, Abd. *Pembaruan Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.
- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Cet.I. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Abubakar, Irfan. "Pengelolaan Wakaf di Pondok Modern Gontor: Menjaga Kemandirian Civil Society" dalam Chaider S Bamualim dan Irfan Abu Bakar. *Revitalisasi Filantropi Islam*. Jakarta: PBB UIN Jakarta, 2005.
- _____. "Pelebagaan Wakaf di Pesantren Tebuireng Jombang: Sebuah Upaya Merespon Kebutuhan Perubahan" dalam Chaider S Bamualim dan Irfan Abubakar. *Revitalisasi Filantropi Islam*. Jakarta: PBB UIN Jakarta, 2005.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*. Jakarta: UIP, 1988.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam Tradisi dan Mordenisasi Menuju Melenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- B, Ahmad Zaki dkk, Pengurusan Harta Wakaf dan Potensinya Kearah Kemajuan Pendidikan Umat Islam di Malaysia. *Pengurusan Jawhar* Vol. 2 no. 2. 2008.
- Bidang Administrasi dan Keuangan PPNU. Laporan Tahunan PPNU 2015/2016, Dokumentasi, 4 Oktober 2017.
- Bukhori, Khoiruddin. *Problem Psikologis Kaum Santri: Resiko Insekuritas Kelekatan*. Yogyakarta: FKKB, 2000.
- Esterbg. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: BumiAksara, 2002.
- Fuad, Muhammad. *Membangun Raksasa Tidur, Problematika Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf di Indonesia*. Depok: Piramedia, 2008.
- Jalaluddin. *Kapita Selekta Pendidikan*. Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- Kementrian Agama RI. "Fikih Wakaf". Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Wakaf, 2006.
- _____. "Fiqih Wakaf". Cet.III; Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
- _____. "Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif". Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2011.
- _____. "Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis". Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013.
- _____. *Quran Tajwid Maghfirah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Lutfi, Mukhtar. *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*. Cet.I. Makassar: Alauddin Press, 2011.
- _____. *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- M, Raya. Manajer Aminah Mart, Wawancara, 3 Oktober 2017.

- Majid, Nurcholish. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramdina, 1997.
- Moelong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mu'allim, Amir. "Isu Terorisme dan Stigmatisasi terhadap Pondok Pesantren (Meluruskan Kesalahpahaman terhadap Pondok Pesantren)". *Jurnal Studi Agama*. Vol. 6. No. 1. 2016.
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqhi Lima Mazhab*. Cet. XXV. Jakarta: Lentera, 2010.
- Munirah. Bendahara PPNU, Wawancara, 4 Oktober 2017.
- Najib, Tuti A dan Ridwan al-Makassary. *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*. Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006.
- Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, *Profil Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum*. Maros: 2017.
- Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Cet.I. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2015.
- S. Praja, Juhaya. *Perwakafan di Indonesia*. Bandung: Yayasan, 1997.
- Sanusi, Tabsyir. Kabid II Administrasi dan Keuangan, Wawancara, 2 Oktober 2017.
- Sanusi, Taufiq. Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, Wawancara, 2 Oktober 2017.
- Setiawan, B dkk. *Ensiklopedi Nasional Indonesia. Jilid XIII*. Jakarta: PT Delta Pustaka, 2004.
- Siddiq, Achmad. *Wakaf Produktif dan Poblematikanya di Dunia Pesantren*. Mojokerto: STIT Raden Wijaya, 2011.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet.8. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suyono, Yusuf dkk. *Wakaf Produktif di Indonesia: Studi atas Pengelolaan Aset Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo*. Semarang: IAIN Walisongo, 2007.
- Syabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid XIV*. Bandung: PT Alma'arifl, 1997.
- Syam, Akbar. Kepala Tata Usaha PPNU, Wawancara, 3 Oktober 2017.
- Usman, Rahmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Zarkasy, Abdullah Syukri. *Manajemen Pesantren: Pengalaman Pondok Modern Gontor*. Ponorogo: Trimurti Press, 2005.

LAMPIRAN

A. Lampran I

Daftar Pertanyaan Untuk Informan

1. Apa saja bentuk wakaf produktif yang terdapat di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum?
2. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum?
3. Bagaimana pemanfaatan dari hasil wakaf produktif di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum?
4. Apa saja kendala yang di hadapi dalam mengelola wakaf produktif di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum?
5. Langkah strategis apa yang dilakukan dalam upaya pengembangan wakaf produktif di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum?
6. Bagaimana kontribusi unit usaha wakaf produktif di lingkungan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

B. Lampiran II

Dokumentasi



Kampus Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum



Bagian depan Aminah Mart PPNU



Bagian Dalam Aminah Mart PPNU



Aktifitas jual beli di Aminah Mart PPNU



Wawancara dengan Kepala Tata Usaha PPNU bapak Akbar Syam (3 Oktober 2017)



Wawancara dengan Manajer Aminah Mart ibu Raya M (3 Oktober 2017)



Struktur Organisasi Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 700 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBIMBING/PEMBANTU PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Nama **Muhammad Ilham B**, Nim: **10200111046** tertanggal **15 Mei 2017** untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul: "**Analisis Konsep Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta dalam Perspektif Ekonomi Islam**"
- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing/pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing/pembantu
c. pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 Jo tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

- Pertama** : Mengangkat/ Menunjuk saudara :
1. **Dr. Rahmawati Muim, M.Ag.**, Sebagai Pembimbing Pertama.
2. **Abdul Rahman, S.Pd., M.Si.**, Sebagai Pembimbing Kedua.
- Kedua** : Tugas Pembimbing/ Pembantu Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah,
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : **Samata-Gowa**
Pada tanggal : **16 Mei 2017**





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1389 TAHUN 2017**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI KOMPREHENSIF
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan Ujian Komprehensif **Muhammad Ilahm B. : NIM: 10200111046**
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk Panitia dan Tim Penguji
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Komprehensif, Jurusan **EKONOMI ISLAM** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
- | | |
|--|-------------------------------------|
| Ketua | : Dr. H. Abdul Wahab, SE., M.Si |
| Sekretaris | : Drs. H. M. Ridwan., M.Si |
| Penguji Dirasah Islamiyah | : Sitti Aisyah, S.Ag., M.Ag. |
| Penguji Dasar Ekonomi Syariah | : Drs. Thamrin Logawali, MH. |
| Penguji Keuangan dan Perbankan Syariah | : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag. |
| Pelaksana | : Fachrunnisa Thamrin, SE. |
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Panitia dianggap bubar setelah menyelesaikan tugasnya.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 12 September 2017
Dekan,



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa
2. Para Dekan dalam Unkup UIN Alauddin Makassar di Makassar
3. Arsip



1 2 0 1 7 1 9 1 4 2 1 4 4 1 4

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 14246/S.01P/P2T/09/2017
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Bupati Maros

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : 4907/EB.I/PP.00.9/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : MUHAMMAD ILHAM B
Nomor Pokok : 10200111046
Program Studi : Ekonomi Islam
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI PONDOK PESANTREN NAHHDATUL ULUM KAB. MAROS "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **28 September s/d 28 Oktober 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 27 September 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1802 TAHUN 2017**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
A.n.Muhammad Ilham B., NIM : 10200111046
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, **Nama : Muhammad Ilham B., NIM : 10200111046, tertanggal 10 November 2016** untuk melaksanakan seminar hasil .
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar hasil, Jurusan **EKONOMI ISLAM** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.**
Sekretaris : Dr. H. Abd. Wahab, SE., M.Si.
Pembimbing I : Dr. Hj. Rahmawati Muin, M.Ag.
Pembimbing II : Abdul Rahman, S.Pd., M.Si.
Penguji I : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Penguji II : Siti Aisyah, S.Ag., M.Ag.
Pelaksana : Fakhrunnisa Thamrin, SE.
1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar hasil penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 10 November 2017

Dekan,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19531022 198703 1 002





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 2087 TAHUN 2017**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan : **Muhammad Ilham B.**
NIM : **10200111046**
Tanggal : **23 November 2017**
Mahasiswa Jurusan : **EKONOMI ISLAM**
Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul "**Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Nahdatul Ulum Kabupaten Maros**"
- Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI. No. 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 241 B Tahun 2010 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin;

UNIVERSITAS MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua** : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
Sekretaris : Dr. H. Abd. Wahab, SE., M.SI.
Penguji I : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Penguji II : Sitti Aisyah, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing I : Dr. Hj. Rahmawati Muin, M.Ag.
Pembimbing II : Abdul Rahman, S.Pd., M.SI.
Pelaksana : Fakhrunnisa Thamrin, SE.
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : **Samata-Gowa**
Pada tanggal : **24 November 2017**

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Ilham B, lahir pada tanggal 4 September 1993 di Gorontalo, merupakan anak ketiga dari 2 orang bersaudara hasil buah kasih dari bapak Buniyamin dan ibunda Nawara Daud. Pendidikan formal dimulai dari Sekolah Dasar di SDN Bontoa Barat Makassar, dan lulus pada tahun 2005. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTs Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Maros dan dinyatakan lulus pada tahun 2008. Dan pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di MA Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Maros dan dinyatakan lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada jurusan Ekonomi Islam fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan dinyatakan lulus pada tahun 2017 dengan gelar Sarjana Ekonomi (SE).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R